



Judul : Asal Papua Tetap NKRI Gerindra Setuju saja Otsus Diperpanjang
Tanggal : Senin, 12 Nopember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Asal Papua Tetap NKRI

Gerindra Setuju Saja Otsus Diperpanjang

ANGGOTA Komisi I DPR Martin Hutabarat meminta Pemerintah membuka dialog para tokoh Papua yang menginginkan otonomi khusus (Otsus) bagi daerahnya diperpanjang. Otsus Papua memang akan berakhir pada 2022.

"Undang-Undang Otonomi Khusus Papua kan dibuat untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan pembangunan, dan kemampuan masyarakat Papua mengurus wilayah sendiri. Kalau dirasakan masih kurang, tidak ada yg salah kalau itu didialogkan dengan Pemerintah. Asalkan tidak beranjak satu sentimeter pun dari NKRI. Papua harus tetap naungan NKRI," kata politisi senior Partai Gerindra ini, kemarin.

Otsus Papua diatur dalam UU

Nomor 21/2001. Di dalamnya dijelaskan bahwa Otsus bagi Papua berlangsung selama 20 tahun. Otsus dimulai sejak 2002. Berarti akan berakhir di 2022.

Menurut Martin, kuatnya dorongan revisi UU Otsus ini tidak lepas dari kekhawatiran tokoh-tokoh Papua bahwa mereka akan terkucilkan kembali dari wilayah NKRI. Mereka khawatir bernasib seperti suku Aborigin di Australia.

"Jadi, memang harus ada dialog. Sebab ada keresahan di masyarakat Papua bahwa mereka nanti akan menjadi suku Aborigin di wilayah Indonesia. Itu ada kekhawatiran kuat. Karena dianggap bahwa kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan mereka meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM selama lebih dari 60 tahun

bersama-sama dengan kita," tambah dia.

Di tempat terpisah, tokoh Forum Senior Papua Theo Waimuri meminta agar UU Otsus Papua dirombak total. Dia ingin UU Otsus meniru sistem otonomi yang diberlakukan Pemerintah China terhadap Hong Kong dan Makau. Dia beralasan, hanya dengan sistem tersebut Papua bisa menjadi provinsi maju dan berkembang.

"Daripada (Pemerintah Pusat) pusing mikirin tanah Papua, ikuti sistem di China saja. One Nation Two System seperti Hong Kong dan Makau. Kalau China bisa, kenapa kita tidak? Saya pikir, dengan One Nation Two System diterapkan ke Papua, itu aman. Malah bisa meredam sumbu (konflik) yang ada di Papua,"

katanya.

Dia menyebut, konsep ini sudah pernah diterapkan Pemerintah ketika Presiden Soekarno berkuasa. Saat melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 4 Mei 1963, Soekarno memberikan pemerintahan otonomi melalui Sekretariat Urusan Irian Barat atau Sekib. Sekib ini menjembatani kepentingan Papua. Seluruhnya masalah moneter, hubungan perdagangan, dan pemerintahan seluruhnya diserahkan ke Papua. Satu-satunya yang tidak diserahkan adalah masalah pertahanan dan keamanan. Namun, Sekib dibubarkan setelah Soekarno digantikan Soeharto.

"Cita-cita kami, daripada selalu ribut soal pelanggaran HAM, ya dibuat saja seperti

Hong Kong dan Makau. Cara terbaik selesaikan Papua adalah One Nation Two System. Karena pemicu sekarang ini adalah ketidakadilan," ucapnya.

Dia mengakui, konsep negara seperti Hong Kong merupakan usulan yang agak naif. Namun demikian, dia meyakini konsep ini dapat menjadi solusi agar Papua bisa bangkit dari keterpurukan, ketidakadilan, dan isu-isu pelanggaran HAM. Pemerintah Pusat juga tidak perlu lagi pusing mencari dana segar untuk memenuhi kewajiban dana Otsus.

"Tensi konflik di Papua bisa turun 70-90 persen. Daripada Otsus, tapi bikin kepala sakit. Dengan One Nation Two System, Pemerintah Pusat tidak perlu kirim lagi dana ke Papua," tandasnya. ■ KAL